

COMPETITIVE ADVANTAGE: KUNCI KEAJAIBAN EKONOMI ASIA TIMUR?

Arya W. Darmaputera*

Don't listen to 'comparative advantage' advice. Whenever we wanted to do anything the advocates of comparative advantage said, "We don't have comparative advantage." In fact, we did everything we wanted, but whatever we did, we did well.

■ Park, Gubernur Bank Sentral Korea¹

Sukses negara-negara Asia Timur yang disebut sebagai *the East Asian miracle* oleh Bank Dunia, begitu sering mendapat kajian dari kalangan ekonom, bahkan menurut Robert Wade, karya ilmiah mengenai sukses Asia Timur, kalau dikumpulkan, mungkin dapat memenuhi satu buah hangar pesawat terbang². Memang kemajuan ekonomi mereka sangat menakjubkan. Misalnya saja bila pada tahun 1963, pendapatan per kapita Korea Selatan baru mencapai US\$ 103 (kurang dari pendapatan per kapita India dan Indonesia) maka pada tahun 1996, mereka sudah meraih pendapatan per kapita US\$ 10,600. Demikian pula dengan Taiwan yang pada tahun 1949 hanya memiliki pendapatan per kapita US\$200 dengan tingkat inflasi 3.000 persen, tetapi kini mempunyai tingkat pendapatan perkapita yang melampaui US\$ 12,000 dengan inflasi antara 3-4 persen per tahun. Demikian juga berlaku untuk Hongkong, apalagi Singapura (yang pendapatannya perkapitanya pada tahun 1996 berhasil melampaui eks-penjajahnya - Inggris)³.

Sebagian besar dari karya ilmiah yang dihasilkan itu berasal dari kalangan 'neoliberal', yaitu menginterpretasikan kemajuan negara-negara ini sebagai hasil dari konsistensi mereka mengikuti resep-resep ekonomi neoklasik. Jadi negara-negara ini dipandang lebih berhasil dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya karena mereka lebih konsisten di dalam mengalokasikan sumberdaya secara efisien lewat pasar bebas.

Ekonomi neoklasik di sini maksudnya adalah keyakinan pada *short-run optimal resource allocation* sebagai prasyarat mutlak maksimalisasi *long-term growth*⁴. Dengan kata lain, agar pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat dicapai secara optimal, alokasi sumberdaya dalam jangka pendek haruslah se-efisien mungkin. Sementara itu efisiensi alokasi sumberdaya jangka pendek, oleh kaum neoklasik, akan optimal bila mekanisme pasar dibiarkan bebas.

* Dosen tetap di Fakultas Ekonomi, Jurusan Studi Pembangunan, Universitas Katolik Parahyangan.

¹ Dikutip dari Yoginder Alagh, "The NIEs and the Developing Asian and Pacific Region: A View from South Asia," *Asian Development Review* 7, no. 2, 1989, hal.161.

² Robert Wade, "East Asia's Economic Success: Conflicting Perspectives, Partial Insights, Shaky Evidence", *World Politics*, vol. 44 (3), April 1992, hal. 270.

³ Jadi negara-negara industri baru yang merupakan *the East Asian Miracle* adalah Taiwan, Korea Selatan, Singapura dan Hongkong. Dan inilah negara-negara yang menjadi fokus perhatian esai ini.

⁴ Robert Colander, (ed.), *Neoclassical Political Economy: The Analysis of Rent-seeking and DUP Activities*, Cambridge, 1984.

Untuk kasus Asia Timur, negara-negara dikatakan berhasil meraih kemajuan ekonomi yang spektakuler, dengan alasan yang sama. Ekonomi neo-klasik liberal juga berhasil di dalam mendominasi institusi-institusi ekonomi internasional seperti Bank Dunia dan IMF, sampai-sampai Thomas J. Bierstecker mengatakan bahwa paradigma ekonomi neo-klasik berhasil menang di dalam arena konflik paradigma negara-negara sedang berkembang⁵.

Namun demikian, kalau kita tinjau kebijakan industrialisasi negara-negara tersebut secara lebih mendalam maka kita akan melihat bahwa negara-negara ini sebenarnya tidak meraih sukses via jalan liberalisme sesuai anjuran ekonomi neo-klasik, melainkan berhasil meraih kemajuan industri dengan ditopang dan didorong oleh negara dan pemerintah (sebuah 'dosa' besar di mata ekonom neo-klasik yang menyatakan bahwa campur tangan pemerintah hanya akan menghasilkan *market failure*). Dan kemajuan industri yang memanfaatkan keunggulan kompetitif itulah yang lebih menonjol diterapkan sana, dibandingkan dengan resep keunggulan komparatif neo-klasik.

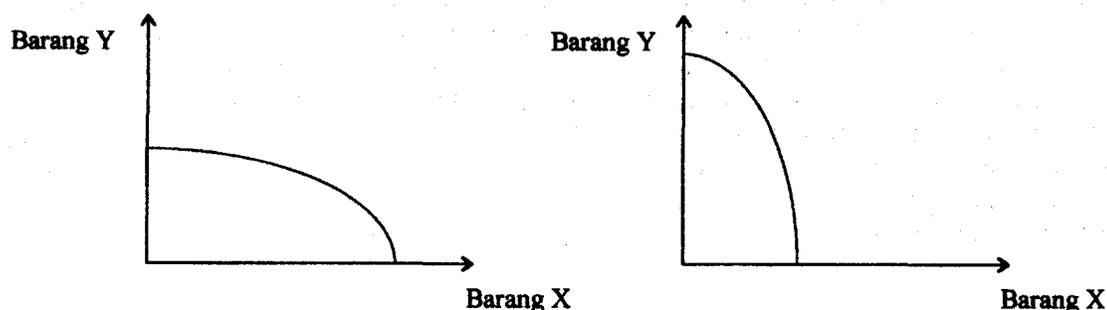
Bagian pertama tulisan ini akan meninjau paradigma dan perangkat teori keunggulan komparatif yang diajukan oleh ekonom neo-klasik. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana negara-negara industri baru ini justru melanggar prinsip-prinsip keunggulan komparatif dan mengembangkan keunggulan kompetitif mereka di bawah kepemimpinan negara yang kuat (yang juga diharamkan ekonom neo-klasik).

Tetapi para pakar studi pembangunan Asia Timur menyatakan bahwa keunggulan kompetitif bukanlah satu-satunya faktor yang berhasil membawa negara-negara ini menikmati pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan. Negara-negara ini mungkin berhasil menikmati kemajuan di sektor industri canggih sampai berhasil menyaingi produk-produk dari Amerika Utara dan Eropa dengan diterapkannya keunggulan kompetitif, tetapi ada kombinasi dari faktor-faktor lain yang berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi tinggi selama lebih dari tigapuluh tahun. Inilah yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Dan kita akan menyimpulkan bagaimana sebuah negara seperti Indonesia dapat belajar dari 'macam-macam' Asia lainnya yang sudah terlebih dahulu maju.

1. Ekonomi Neo-klasik dan Keunggulan Komparatif

Mahasiswa fakultas ekonomi biasanya lebih mengenal teori keunggulan komparatif yang menjadi intisari dari pembahasan matakuliah seperti Ekonomi Internasional. Pada awalnya, teori keunggulan komparatif dicetuskan oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa sebuah negara harus berspesialisasi pada komoditi-komoditi yang dapat dihasilkan dengan biaya komparatif yang lebih murah. Teori ini dipupuk dan dikembangkan terus oleh para ekonom neo-klasik sehingga teori ekonomi internasional modern sekarang mengenal apa yang dikenal sebagai Teori Hecksher-Ohlin (H-O). Model H-O dapat digambarkan dengan model dua negara seperti ini:

⁵ Thomas J. Bierstecker, "The Triumph of Neo-classical Economics in the Developing World: Policy Convergence and the Basis of Governance in the International Economic Order", dalam J. Rosneau (ed.), *Governance Without Government*, Cambridge, 1992.



* Production Possibilities Frontier Negara 1 *

* Production Possibilities Frontier Negara 2 *

Bila barang X adalah barang yang *labor-intensive* dan barang Y adalah barang yang *capital-intensive*, dan kurve PPF (*production possibilities frontier*) kedua negara adalah seperti yang di atas maka menurut Teori Hecksher-Ohlin, negara-negara tersebut harus berspesialisasi sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Kita dapat melihat bahwa Negara 1 adalah negara yang relatif *labor-abundant* (kaya tenaga kerja) dan bisa menghasilkan barang *labor-intensive* (X) dengan biaya komparatif yang lebih murah (kurve PPF menunjukkan bahwa kemungkinan produksi maksimal barang X lebih besar daripada barang Y). Sehingga negara tersebut seharusnya berspesialisasi memproduksi barang X; dan bila membutuhkan barang-barang *capital intensive* (seperti Y), negara itu cukup mengimpor saja dari negara lainnya. Demikian pula Negara 2 terlihat sebagai negara yang relatif *capital-abundant* (kaya modal) sehingga bisa menghasilkan barang *capital-intensive* (Y) dengan biaya komparatif yang lebih murah. Dengan demikian negara ini seharusnya berspesialisasi pada barang Y, dan bila membutuhkan barang-barang yang *labor intensive*, mereka tinggal mengimpor dari negara lainnya⁶.

Bagaimana aplikasinya di dunia nyata? Bila misalnya Korea pada tahun 1960an kelebihan tenaga kerja (dan dengan demikian upah buruh di sana relatif murah), maka negara harus berspesialisasi di industri-industri padat-karya (misalnya saja industri tekstil, sepatu, makanan, dsb.) karena bisa menghasilkan komoditi-komoditi tersebut dengan harga yang relatif murah (sehingga laku di pasar internasional), sekaligus sedikit-banyak menyelesaikan masalah *oversupply* buruh di negara tersebut. Daripada berusaha menghasilkan sendiri barang-barang *capital intensivenya* (elektronik, otomotif, dsb.) dengan biaya mahal karena kelangkaan modal yang dimiliki, lebih baik Korea mengimpor saja dari negara seperti Amerika atau Eropa yang memang mempunyai keunggulan komparatif pada produk-produk tersebut.

Tetapi apakah itu yang akhirnya dilakukan oleh Korea (dan Taiwan) pada masa itu? Samasekali tidak. Walaupun kedua negara ini menghadapi tantangan dari Amerika dan Bank Dunia untuk tetap memproduksi sesuai dengan keunggulan komparatif mereka, tetapi seperti ungkapan Gubernur Bank Sentral Korea di awal tulisan ini, mereka tidak peduli dan justru mengembangkan industri berteknologi canggih sebagai antisipasi masa depan. Memang teori keunggulan komparatif mempunyai kelemahan pokok dimana ia tidak melihat perkembangan ekonomi sebagai sesuatu yang dinamis, seolah suatu negara yang sudah berspesialisasi di sektor tertentu akan bergerak terus di sektor tersebut saja. Padahal akhirnya, Korea, Taiwan, Singapura dan Hongkong justru berhasil meraih kemajuan yang

⁶ Lihat buku-buku teks Ekonomi Internasional seperti karangan Miltiades Chacoliades (terbitan McGraw-Hill), Paul Krugman & Maurice Obstfeld (Harper-Collins), Dominick Salvatore (MacMillan, dan lain-lain).

dinamis pada tiap tahap pembangunan. Pada tahun 1960an, mereka mulai membangun industri-industri elektronika dan otomotif pada saat Bank Dunia mendesak mereka untuk memproduksi tekstil dan sejenisnya saja, sehingga pada awal 1970an mereka, bersama dengan Jepang, malahan berhasil menyalip Amerika Serikat di dalam ekspor produk-produk elektronik. Begitu hebatnya sampai ekspor AS untuk produk-produk tersebut anjlok tajam dan mereka menderita goncangan ekonomi yang terparah sejak depresi 1930an. Begitu parahnya sehingga pada tahun 1973 mereka terpaksa mendevaluasi dollarnya dan mulai mengambil langkah-langkah proteksi untuk melindungi industri di dalam negeri.

2. Industrialisasi Orientasi Ekspor: *Competitive Advantage* Dalam Praktek

Pada bagian yang lalu, jelas terlihat 'pelanggaran' pertama negara-negara Asia Timur terhadap resep ekonomi neo-klasik, yakni dengan menjalankan industrialisasi yang mengabaikan keunggulan komparatif. Negara-negara ini tidak hanya bertumpu memproduksi barang-barang yang menggunakan sumberdaya yang tersedia secara relatif *abundant* di masing-masing negara tetapi mengembangkan produk-produk yang untuk sementara bukan merupakan keunggulan mereka, namun diharapkan akan menjadi andalan mereka di masa mendatang. Dengan kata lain, negara-negara ini 'mengorbankan' *short-run optimal resource allocation* (efisiensi pasar jangka pendek) untuk meraih kemajuan *long-term* masa depan.

Tapi 'dosa' mereka tidak hanya di situ saja. Negara-negara tersebut menjalankan kebijakan industri yang sangat mengandalkan kepemimpinan negara di dalam sektor-sektor ekonomi⁷ - hal yang dianggap tabu oleh prinsip *laissez-faire* neo-klasik. Misalnya saja Korea, setelah jatuhnya rejim Syngman Rhee dan tampilnya Jendral Park Chung-Hee sebagai presiden pada tahun 1961, pemerintah memegang posisi kunci di dalam pembangunan industri. Misalnya saja dengan diadakannya pertemuan bulanan pengusaha dengan pemerintah di 'Gedung Biru' (istana kepresidenan Korsel di Seoul) untuk membicarakan langkah-langkah konkrit pembangunan ekonomi. Hal ini kemudian diteruskan oleh penggantinya, yakni Jendral Chun Doo-Hwan yang menjadi presiden pada tahun 1980. Mereka juga mempunyai institusi-institusi ekonomi nasional yang kuat dan yang mempunyai kemampuan untuk merencanakan, mengimplementasikan dan merivisi rencana-rencana produksi dan distribusi⁸. Misalnya saja dengan lembaga penelitian KIET (*Korean Institute for Economics and Technology*) dan lembaga promosi ekspor KOTRA (*Korean Trade Promotion Corporation*) yang bergerak di bawah EPB (*Economic Planning Board*)⁹.

Di Taiwan, pemerintah nasionalis *Kuo Min Tang* (KMT) di bawah Chiang Kai Shek dan anaknya Chiang Ching Kuo juga menjalankan campur tangan yang kuat di dalam pembangunan industri. Dan mereka pun memiliki institusi ekonomi seperti lembaga penelitian ITRI (*Industrial Technology Research Institute*) yang membawahi laboratorium-laboratorium seperti ERSO (untuk produk elektronika) dan CCL (untuk komputer dan komunikasi) yang bergerak di bawah CEPAD (*Council for Economic Planning and*

⁷ Lihat misalnya Linda Weiss & John Hobson, *States and Economic Development*, Polity Press, Cambridge, 1995.

⁸ Lihat Ray Kiely, "Development Theory and Industrialisation: Beyond the Impasse", *Journal of Contemporary Asia* 24(2), 1994. Juga Robert Wade, *Governing the Market*, Princeton University Press, 1990.

⁹ Linda Weiss, "Sources of the East Asian Advatage: An Insitutional Analysis", dalam R. Robison (ed.), *Pathways to Asia: The Politics of Engagemnt*, Allen-Unwin, Sydney, 1996, hal. 183.

Development)¹⁰. Terlebih lagi Jepang dengan MITnya (*Ministry of International Trade and Industry*) yang tersohor serta kaki-tangannya yaitu JETRO (*Japan External Trade Organization*) yang bertugas melakukan promosi ekspor, dan malahan belakangan ini dituduh melakukan spionase terhadap perusahaan-perusahaan Amerika¹¹.

Kesemuanya menunjukkan bahwa negara dan pemerintah ikut campur tangan secara aktif, bukan saja di dalam perencanaan namun juga di dalam implementasi ekonomi. Dan lebih daripada itu, mereka memilih prioritas industri yang akan dikembangkan secara nasional, atau istilah Barat-nya '*picking winners*'¹². *Picking winners* (memilih pemenang) sekali lagi bertentangan dengan prinsip persaingan bebas yang berpendapat bahwa persaingan antar-industri harus bebas dan tanpa ada yang mendapat dukungan pemerintah sehingga industri yang muncul sebagai 'pemenang' dari persaingan tersebut adalah murni yang paling efisien dan bukannya yang dikontrol pemerintah. Namun dari tabel berikut ini jelaslah bahwa ada pola industrialisasi yang secara sadar direncanakan oleh pemerintah, dengan memberikan berbagai kemudahan untuk industri-industri yang menjadi prioritas, seperti tax-holiday, kemudahan ekspor, dan lain-lain

Tabel-1 Orientasi Industri Korea Selatan dan Taiwan

Strategi Pembangunan	Korea Selatan	Taiwan
Ekspor Barang Pertanian (Taiwan, 1895-1945) (Korsel, 1910-1945)	Beras, kacang-kacangan (rejim kolonial Jepang)	Gula, beras (rejim kolonial Jepang)
ISI Primer (Taiwan, 1950-1959) (Korsel, 1953-1960)	Makanan, minuman, tembakau, tekstil, pakaian, alas kaki, semen, manufaktur ringan (produk dari kayu, kulit, karet, dan kertas)	
EOI Primer (Taiwan, 1960-1972) (Korsel, 1961-1972)	Tekstil, pakaian jadi, elektronik, kayu lapis, wlg, bahan kimia, kertas, baja	Tekstil, pakaian jadi, elektronik, kayu lapis, plastik, bahan kimia, pengolahan minyak, kertas
ISI dan EOI Pendalaman (1973 - sekarang)	Otomotif, galangan kapal, produk baja dan logam, petrokimia, tekstil dan pakaian jadi, elektronik, video, mesin-mesin	Baja, petrokimia, komputer, telekomunikasi, tekstil, pakaian jadi

sumber: Gary Gereffi, "International Economies and Domestic Policies", dalam A. Martinelli & N. Smeltzer (eds.), *Economy and Society: Overviews in Economic Sociology*, Sage, 1990, hal.237

Sejak terlepas dari rejim kolonial Jepang, Taiwan dan Korea Selatan dalam contoh di atas terlihat melaksanakan kebijakan industri yang selektif secara sadar dengan memprioritaskan industri-industri secara dinamis. Mula-mula di dalam rangka *import substitution industrialization* (ISI), dilanjutkan dengan *export oriented industrialization* (EOI) dan pendalaman ISI dan EOI untuk produk-produk yang lebih canggih sejak tahun 1973. Terlihat bahwa sejak 1960an, saat kedua negara ini tidak memiliki keunggulan di bidang elektronik, misalnya, mereka mengembangkan industri ini sebagai antisipasi untuk masa depan. Dan inilah yang menyebabkan mereka pada saat ini menguasai pangsa pasar internasional untuk berbagai produk elektronik seperti TV, audio/video, mesin cuci, dan sebagainya.

¹⁰ Ibid., hal. 184.

¹¹ "With Friends Like These", *US News & World Report*, 16 Juni 1997.

¹² Istilah ini muncul dalam konotasi yang negatif di buku-buku teks ekonomi internasional seperti di dalam Dominick Salvatore, *International Economics*, 4th ed., MacMillan, 1993, hal. 267.

3. Industrialisasi Berkesinambungan: Kolaborasi tanpa Korupsi

Keunggulan kompetitif dan keberanian negara-negara ini untuk mengambil inisiatif ekonomi yang berwawasan ke depan memang adalah salah satu faktor penentu keberhasilan ekonomi mereka. Tetapi ada kombinasi faktor-faktor lainnya yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi perekonomian negara-negara lainnya, termasuk Indonesia, bukan saja di dalam meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga keberhasilan mereka mempertahankan angka yang tinggi ini selama puluhan tahun (lihat tabel berikut).

Tabel-2 Pertumbuhan GDP Riil di Taiwan and Korea Selatan (%)

Tahun	Taiwan	Korea
1960-70	9.2	8.6
1970-80	9.7	9.5
1980-90	10.2	9.7
1991	7.6	9.1
1992	6.8	5.1
1993	6.3	5.8
1994	6.5	8.4
1995	6.7	9.3
1996	6.5	7.7

sumber: untuk data 1960-90, U.N. World Development Report 1991, untuk data 1991-96, Institute of Developing Economies (Ajiro Keizai Kenkyusho).

Pada bagian yang lalu telah disinggung bahwa faktor yang ikut menentukan keberhasilan negara-negara ini adalah peran negara yang kuat, yang bisa merangkul segenap kekuatan ekonomi untuk kemajuan bangsa. Hal ini berarti harus ada hubungan yang erat antara negara dan bisnis. Tapi hubungan yang erat ini mempunyai makna berkolaborasi dan bekerjasama, tetapi tidak sampai terjebak kepada kolusi dan korupsi. Pakar ekonomi Jepang, Chalmers Johnson mengemukakan istilah *developmental state* untuk menyebut suatu pemerintahan negara yang aktif di dalam perencanaan dan pembangunan ekonomi, dimana ada kerjasama yang erat antara pemerintah dan dunia usaha. Tetapi kerjasama yang erat ini bukanlah satu-satunya syarat sebuah negara disebut sebagai *developmental state*. Ternyata ada dua prasyarat lagi yang harus dipenuhi yakni (1) birokrasi yang disiplin dan bersih serta (2) pengembangan lembaga-lembaga (*institution building*) yang memungkinkan negara mengambil peran aktif di dalam perekonomian. Hubungan erat negara dan bisnis tanpa kedua prasyarat ini hanya akan mengakibatkan kolusi dan korupsi yang justru membahayakan perekonomian nasional¹³.

Institution building memungkinkan negara, melalui lembaga-lembaga ekonominya, ikut aktif di dalam perekonomian. Dan birokrasi yang bersih dan berdisiplin, yang merupakan ciri dari negara-negara industri baru Asia (Jepang, Korsel, Taiwan dan Singapura), penting agar kolaborasi itu tidak beralih menjadi sumber korupsi. Alice Amsden mengatakan bahwa semua negara berkembang pada hakekatnya memiliki aparat yang relatif kuat terhadap kelas buruh, tapi yang membuat negara-negara industri baru (di Asia) berbeda dan sukses adalah bahwa aparat juga relatif kuat terhadap kelas

¹³ Chalmers Johnson, *MITI and the Japanese Miracle*, Norton, 1982, hal. 109.

pemilik modal¹⁴. Negara tidak membiarkan dirinya disetir oleh kelompok-kelompok kepentingan kapitalis tetapi sebaliknya pemilik kapital-lah yang dibimbing oleh pemerintah untuk mengerahkan kemampuan ekonominya dan membangun sektor-sektor industri yang menguntungkan rakyat banyak. Hubungan ini oleh Linda Weiss disebut sebagai *'governed interdependence'* (interdependensi terpimpin). Interdependen karena pemerintah dan swasta saling mengisi satu sama lain, terpimpin karena pemerintahlah (dan bukan swasta) yang lebih dominan di dalam kerjasama tersebut. Dengan demikian pemerintah tidak membiarkan dirinya dirongrong oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek dan *rent-seeking* dunia usaha.

Jadi industri yang dikembangkan dalam rangka keunggulan kompetitif bukanlah proyek-proyek prestise atau yang merupakan hasil lobi kepentingan kapitalis, melainkan yang dinilai oleh pemerintah dapat bermanfaat bagi rakyat banyak dan yang menguntungkan sebanyak mungkin orang. Hal ini terbukti dengan menurunnya indeks Gini (ukuran ketimpangan pendapatan), justru pada saat pembangunan sedang gencar-gencarnya. Taiwan menikmati penurunan angka ketimpangan yang paling menakjubkan, dari 0,46 (pada tahun 1961) menjadi kurang dari 0,30 memasuki tahun 1990an. Korea mempunyai indeks Gini sekitar 0,33 sementara Singapura dan Hongkong sekitar 0,40. Bandingkan dengan negara-negara Amerika Latin seperti Brazil dan Meksiko yang mencapai angka 0,60¹⁵.

Selain itu, bila ada industri yang diberi insentif atau fasilitas, kemudahan tersebut diberikan atas dasar 'proyek apa' dan bukannya 'proyek siapa'. Artinya siapapun yang mau mengusahakan industri-industri yang sesuai dengan prioritas negara akan diberi kemudahan, dan bukannya oknum-oknum tertentu saja.

Jadi sistem ekonomi negara-negara Asia Timur, terutama Jepang, memberi pelajaran kepada Indonesia, dan bahkan kepada Amerika mengenai bagaimana pemerintah dan dunia usaha dapat bersatu-padu menjawab tantangan-tantangan internasional dan globalisasi. Tidak seperti Amerika yang menganggap persaingan mendatangkan efisiensi, Jepang menganggap bahwa kerjasama dan koordinasi justru akan menghasilkan efisiensi. Sejarah membuktikan bersatupadunya kemampuan negara dan swasta Jepang memungkinkan terselenggaranya perekonomian yang mempunyai visi jangka panjang, serta memungkinkan pula mereka menanamkan investasi pada riset dan pengembangan. Sebaliknya di Amerika, karena perusahaan-perusahaan swasta dibiarkan bersaing di dalam "pasar", keuntungan jangka pendeklah yang mereka kejar. Menurut Fingleton, perusahaan Jepang menanamkan investasi dua sampai tiga kali lebih banyak per pekerja dibandingkan dengan perusahaan Amerika¹⁶. Investasi besar, yang diperlukan untuk riset dan pengembangan tentu dianggap mengurangi keuntungan jangka pendek tersebut. Apalagi ketiadaan kerjasama yang berarti diantara dunia swasta mengakibatkan usaha riset dan pengembangan berjalan sendiri-sendiri malah menjadi "rahasia perusahaan" yang tidak mungkin dibagikan kepada perusahaan lain yang dianggap sebagai pesaing.

¹⁴ Alice Amsden, *Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization*, Oxford University Press, 1989, hal. 63.

¹⁵ Peter Evans, "Class, State, and Dependence in East Asia: Lessons for Latin Americanistas", dalam G. Gereffi and D. Wyman (eds.), *Manufacturing Miracles: Paths of Industrialisation in Latin America and East Asia*, Princeton University Press, 1990, hal. 218.

¹⁶ E. Fingleton, *Blindside: Why Japan is Still On Track to Overtake the US by the Year 2000*, Simon & Schuster, 1995, hal. 42.

Sebenarnya, hubungan negara dan bisnis di Indonesia lebih mirip Jepang ketimbang Amerika. Namun Indonesia tidak otomatis dapat dikatakan sebagai *developmental state*nya Chalmers Johnson. Walaupun ada kolaborasi dunia swasta dengan pemerintah di dalam perekonomian, kedua syarat *developmental state* yang disebutkan di atas belum cukup terpenuhi. *Pertama*, birokrasi yang bersih dan berdisiplin masih kurang di Indonesia, dan hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain minimnya gaji, pengawasan yang kurang, korupsi terstruktur, dan sebagainya. *Kedua*, institusi-institusi tempat bertemunya negara dan swasta membicarakan masalah-masalah perekonomian memang ada di Indonesia, antara lain Kadin dan asosiasi-asosiasi perdagangan lainnya, tetapi lebih sering suatu kerjasama bisnis terbentuk bukan sebagai hasil musyawarah di lembaga-lembaga ini, melainkan hasil dari negosiasi-negosiasi individual (swasta dengan swasta lainnya atau swasta dengan pemerintah) di luar badan-badan tersebut yang bersifat *lobbying*.

Karena itulah, banyak pengamat ekonomi yang memandang dengan curiga hubungan swasta dan pemerintah yang erat. Memang ini tidak salah, karena kolaborasi yang sering terjadi di Indonesia lebih banyak berbau kolusi. Tetapi melihat pengalaman Jepang dan negara-negara Asia Timur lainnya yang berhasil mencapai kemajuan ekonomi berkat *competitive advantage* yang dipimpin campur tangan pemerintah, sebaiknya hubungan negara dan swasta tidak digeneralisasikan sebagai sesuatu yang buruk. Yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki adalah kedua prasyarat *developmental state*: membangun mentalitas birokrat yang disiplin dan bersih serta menggunakan institusi-institusi kerjasama pemerintah dan swasta secara serius.

4. Kesimpulan: *Comparative Advantage Plus*

Dari pembahasan ini, jelaslah bahwa keberanian negara untuk mengambil langkah-langkah industrialisasi selektif yang bertumpu pada *competitive advantage* adalah salah satu kunci keberhasilan negara-negara industri baru Asia. Tetapi pemilihan industri yang menjadi prioritas tidak dilakukan secara serampangan, apalagi hanya berdasarkan kepentingan individu atau bisnis, melainkan melalui pertimbangan yang matang sehingga yang menjadi prioritas adalah industri-industri yang potensial di masa mendatang, dan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin rakyat.

Selain itu, terlihat pula bagaimana negara-negara ini samasekali tidak mengikuti resep yang diberikan oleh ekonom-ekonom neoliberal/neoklasik. Campur tangan pemerintah yang aktif di dalam ekonomi, *picking winners*, dan kerjasama yang erat antara bisnis dan pemerintah, yang semuanya dikecam oleh teori ekonomi neoklasik, justru menjadi sumber keberhasilan dan kejayaan ekonomi mereka.

Negara-negara industri baru Asia peringkat dua seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina, dapat belajar dari negara-negara Asia yang sudah terlebih dahulu maju dengan menjalankan keunggulan kompetitif plus faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor plus ini antara lain adalah: (1) Kerjasama bisnis dan pemerintah yang harmonis namun tidak sampai terjebak kepada kolusi dan korupsi, sehingga membutuhkan (2) Birokrasi ekonomi yang benar-benar bersih dan disiplin; (3) Pemilihan industri yang diperkirakan mendatangkan manfaat bagi rakyat banyak dan bukannya yang mendatangkan prestise atau keuntungan bagi minoritas penduduk saja; serta (4) *Institution building*, yaitu pengembangan institusi-institusi ekonomi sebagai wadah untuk koordinasi dan saling

bekerjasama antar-pelaku bisnis sehingga kekuatan ekonomi nasional dapat bersatu padu menggabungkan kekuatan menghadapi semakin mengglobalnya dunia usaha internasional.

Melihat faktor-faktor penentu tersebut, masih banyak yang harus diperbaiki di dalam sistem perekonomian Indonesia. Misalnya saja penentuan prioritas industri yang tidak transparan dan kadang-kadang tidak masuk akal dan hubungan bisnis dan pemerintah yang terjebak pada korupsi dan kolusi, misalnya saja pemberian fasilitas dan kemudahan masih lebih banyak diberikan atas dasar "ini proyeknya siapa" dibandingkan "ini proyek apa". Hal-hal inilah yang perlu diperbaiki terus, terutama di dalam menghadapi tantangan yang semakin berat di masa mendatang. #

Daftar Pustaka

- Alagh, Yoginder, "The NIEs and the Developing Asian and Pacific Region: A View from South Asia," *Asian Development Review* 7, no. 2, 1989.
- Amsden, Alice, *Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization*, Oxford University Press, 1989
- Bierstecker, Thomas J., "The Triumph of Neo-classical Economics in the Developing World: Policy Convergence and the Basis of Governance in the International Economic Order", dalam J. Rosneau (ed.), *Governance Without Government*, Cambridge, 1992.
- Colander, Robert (ed.), *Neoclassical Political Economy: The Analysis of Rent-seeking and DUP Activities*, Cambridge, 1984.
- Evans, Peter, "Class, State, and Dependence in East Asia: Lessons for Latin Americanistas", dalam G. Gereffi dan D. Wyman (eds.), *Manufacturing Miracles: Paths of Industrialisation in Latin America and East Asia*, Princeton University Press, 1990.
- Fingleton, E., *Blindside: Why Japan is Still On Track to Overtake the US by the Year 2000*, Simon & Schuster, 1995.
- Johnson, Chalmers, *MITI and the Japanese Miracle*, Norton, 1982.
- Kiely, Ray, "Development Theory and Industrialisation: Beyond the Impasse", *Journal of Contemporary Asia* 24(2), 1994.
- Salvatore, Dominick, *International Economics*, 4th ed., MacMillan, 1993.
- Wade, Robert, "East Asia's Economic Success: Conflicting Perspectives, Partial Insights, Shaky Evidence", *World Politics*, vol. 44 (3), April 1992.
- _____, *Governing the Market*, Princeton University Press, 1990.
- Weiss, Linda, "Sources of the East Asian Advantage: An Institutional Analysis", dalam R. Robison (ed.), *Pathways to Asia: The Politics of Engagement*, Allen-Unwin, Sydney, 1996.
- _____, & Hobson, John, *States and Economic Development*, Polity Press, Cambridge, 1995.
- "With Friends Like These", *US News & World Report*, 16 Juni 1997.